

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN MUARO JAMBI

Tri Arsa Anugrah Putri

NPP. 29.0377

Asdaf Provinsi Jambi

Program Studi Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat

Email: triarsaanugrahputri@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the problem that forest and land fires are still found in Muaro Jambi Regency, most of which occur due to the large area of peatlands that are used as land use efforts by community members and several companies. **Purpose:** The purpose of this study was to determine the Effectiveness of Forest and Land Fire Disaster Management Policies in Muaro Jambi Regency, Jambi Province regarding the programs contained in Jambi Province Regional Regulation Number 2 of 2016 concerning disaster management. **Methods:** This study uses a descriptive qualitative method with an inductive approach and an analysis of the effectiveness theory by Duncan in Steers. Data collection techniques using in-depth interviews (18 informants), documentation and observation. **Results/Findings:** There is a shortage of field personnel, public outreach that is not given much attention, inadequate facilities and infrastructure, difficulty in accessing the scene, and lack of public awareness of preparedness in the event of a disaster. **Conclusion:** That the effectiveness of forest and land fire disaster management policies in Muaro Jambi Regency by looking at the contents of the program has been implemented but has not run optimally, although there are several inhibiting factors, efforts have been made to carry out socialization, counseling, as well as training, addition of personnel as well as facilities and infrastructure to support disaster management activities.

Keywords: Effectiveness, Forest and Land Fires, Program

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan masih ditemukannya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi sebagian besar terjadi akibat luasnya wilayah lahan gambut yang menjadi usaha pemanfaatan lahan yang dilakukan warga masyarakat dan beberapa perusahaan. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Efektivitas Kebijakan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi mengenai program-program yang terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016 menyangkut tentang penanggulangan bencana. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan analisis terhadap teori efektivitas oleh

Duncan dalam Steers. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara mendalam (18 informan), dokumentasi dan observasi. **Hasil/Temuan:** Adanya kekurangan personil lapangan, sosialisasi publik yang tidak begitu diperhatikan, sarana dan prasarana yang tidak memadai, sulitnya akses ke tempat kejadian, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesiapsiagaan apabila terjadinya bencana. **Kesimpulan:** Bahwa Efektivitas kebijakan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi dengan melihat apa-apa saja yang menjadi isi dalam program sudah dilaksanakan namun belum berjalan dengan maksimal, meskipun terdapat beberapa faktor penghambat tersebut namun upaya yang dilakukan dengan mengadakan sosialisasi, penyuluhan, serta pelatihan, penambahan personil serta sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penanggulangan bencana.

Kata Kunci: Efektivitas, Kebakaran Hutan dan Lahan, Program

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kaya akan hutan dan lahan merupakan hadiah terbesar dari Tuhan Yang Maha Esa karena hutan dan lahan sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Akibat dari sumber daya alam yang melimpah, Indonesia juga menjadi Negara dengan tingkat rawan bencana alam yang besar, khususnya bencana akan kebakaran hutan dan lahan yang awalnya dianggap biasa dan lama kelamaan itu menjadi sebuah bencana bagi Negara Indonesia. Pemerintah Indonesia bertanggung jawab agar setiap warga negara Indonesia mendapat hak-hak dasar, salah satunya hak atas kesehatan, perlindungan, rasa aman, bebas dari ancaman, termasuk resiko dari dampak bencana. Masyarakat yang memiliki pengetahuan rendah dalam menanggapi ancaman bencana tersebut yang menyebabkan terganggunya kehidupan bermasyarakat. Bencana adalah suatu rangkaian kejadian yang memunculkan terjadinya ketidakseimbangan pada masyarakat yang menimbulkan kerugian pada salah satu aspek kehidupan bermasyarakat baik dari bidang ekonomi, materi, maupun lingkungan yang melewati batas kemampuan dari masyarakat itu sendiri dalam mengatasinya. Landasan hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana, dan selanjutnya presiden mengeluarkan peraturan yaitu Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai badan nasional yang berfungsi pengkoordinasian penanggulangan bencana dengan terencana, terpadu, dan menyeluruh, dan diharapkan penanggulangan bencana semakin meningkat dan terencana. Provinsi Jambi dilihat secara geografis berada pada 0o45'-2o45' Lintang Selatan dan 101o10'-104o55' Bujur Timur. Provinsi jambi termasuk dalam kategori daerah dengan persebaran titik api yang sangat luas. Pada tahun 2019 tercatat persebaran titik api mencapai 1.784 dan kebakaran tersebut terjadi akibat pembukaan lahan baru yang dilakukan dengan cara membakar hutan di daerah lahan perkebunan masyarakat maupun daerah perkebunan milik swasta. Menurut pantauan satelit NOAA (*National Oceanic and Atmospheric Administration*) yang menganalisis parameter yang berhubungan dengan oseanografi, hidrologi, dan meteorology untuk mengamati kondisi permukaan bumi, berikut peta persebaran titik api di Provinsi Jambi di tahun 2019: (Sumber: <https://pgsp.big.go.id/satelit-noaa/> diakses pada 10 September 2021). Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi sebagian besar terjadi akibat luasnya wilayah lahan gambut yang menjadi usaha pemanfaatan lahan yang dilakukan warga masyarakat dan beberapa perusahaan. Kebakaran lahan menurut Peraturan

Gubernur Jambi tahun 2009 tentang Prosedur Tetap Mobilisasi Sumber Daya Dalam Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan di Provinsi Jambi yaitu suatu keadaan dimana kerusakan lahan yang terjadi akibat pembakaran lahan memberikan dampak kerugian pada lingkungan maupun ekonomi. Lebih dari 99,9% kebakaran lahan gambut terjadi karena manusia baik disengaja ataupun tidak disengaja dan kelalaian manusia saat melakukan Pembukaan lahan secara illegal dengan cara membakar. pembukaan lahan dengan cara membakar merupakan cara yang paling mudah dan lebih efektif serta menghemat biaya. Dan sudah menjadi budaya masyarakat Jambi apabila ingin membuka lahan hanya dengan membakar lahan tersebut tanpa tahu dampak yang ditimbulkan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi. Kebakaran lahan gambut merupakan masalah serius yang harus dihadapi karena bencana ini terjadi hampir setiap tahun pada musim kemarau. Fakta beberapa kebakaran lahan menunjukkan bahwa penanganan kebakaran lebih menitikberatkan pada aspek pemadaman daripada aspek pencegahan. Kerugian yang ditimbulkan akibat bencana kebakaran hutan dan lahan di kawasan wilayah Kabupaten Muaro Jambi memberikan dampak pada aspek ekonomi, aspek sosial, serta aspek psikologi korban bencana, serta memerlukan beberapa upaya untuk menanggulangi bencana tersebut. Pemerintah pusat dalam upaya penanganan penanggulangan bencana telah membuat suatu kebijakan publik yaitu dengan membentuk salah satu badan nasional yang bertanggung jawab membidangi bagian penanggulangan bencana yaitu BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan yang berkaitan dengan efektivitas kebijakan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi yaitu kerugian yang ditimbulkan akibat bencana kebakaran hutan dan lahan di kawasan wilayah Kabupaten Muaro Jambi memberikan dampak pada aspek ekonomi, aspek sosial, serta aspek psikologi korban bencana, serta memerlukan beberapa upaya untuk menanggulangi bencana tersebut. Pemerintah pusat dalam upaya penanganan penanggulangan bencana telah membuat suatu kebijakan publik yaitu dengan membentuk salah satu badan nasional yang bertanggung jawab membidangi bagian penanggulangan bencana yaitu BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana).

Namun setelah diterapkannya penanggulangan bencana dilakukan secara terstruktur mulai dari pra bencana, kejadian bencana, hingga kendala yang dihadapi BPBD karena lokasi yang sulit dijangkau, sumber air yang jauh dari lokasi kebakaran, kurangnya kesadaran akan bahaya kebakaran, serta kurangnya sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang berdampak pada minimnya pengetahuan masyarakat. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh BPBD. Peran BPBD masih memiliki kendala dalam menjalankan tugasnya dikarenakan banyak hal yang belum terlaksana sehingga kurang efektif dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi di lapangan, yang dalam dua tahun terakhir tahun 2019-2020 di Muaro Jambi mengakibatkan kerugian bagi perekonomian Negara, kehidupan ekosistem, dan masyarakat sekitar yang terkena dampak kebakaran hutan dan lahan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya, yaitu terkait dengan efektivitas kebijakan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian Adelina Manullang dan Maesaroh berjudul *Efektivitas Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Semarang*, menemukan bahwasannya Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah

di Kabupaten Semarang belum efektif ditandai dengan adanya beberapa faktor penghambat yaitu sarana dan prasarana yang terbatas, alokasi dana yang tidak mencukupi untuk kegiatan penanggulangan bencana, belum memadainya kapasitas kelembagaan, dan jumlah SDM berkompentensi di BPBD terbatas.

Penelitian berikutnya yaitu penelitian dari Meyga Sisilia, Yulia Nurjannah dan Tukiman yang berjudul *Efektivitas Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Perwali Nomor 99 Tahun 2016 Untuk Mengatasi Pencemaran Air Limbah Pabrik*, penelitian ini menjelaskan bahwasannya Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2016 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang sudah dikeluarkan Pemerintah Kota Surabaya sudah berjalan sesuai dengan prosedurnya.

Penelitian berikutnya yaitu dari Mutaqqin yang berjudul *Peran Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan* yang berkesimpulan bahwasannya Penguatan masyarakat disekitar TAHURA terhadap bencana kebakaran hutan dilakukan dengan sosialisasi penyadartahuan tentang bencana kebakaran hutan dan pelibatan masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan non kayu di kawasan TAHURA untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang diharapkan dapat merubah kebiasaan masyarakat sekitar TAHURA untuk membuka lahan dengan cara membakar.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana fokus penelitian yang dilakukan penulis berbeda dari yang sebelumnya, selain itu lokasi penelitian yang di lakukan pada Kabupaten Muaro Jambi. Berbeda dari Adelina Manullang dan Maesoroh, Meyga Sisilia, Yulia Nurjannah dan Tukiman, Mutaqqin. Selain itu efektivitas kebijakan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi telah dibentuk BNPB sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2007 tentang pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sesuai dengan rujukan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana. Lembaga ini dibentuk atas perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk mengatasi bencana di Indonesia. Dalam Undang-Undang yang sama, pada Pasal 18 disebutkan tentang pengamanatan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk setingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut diharapkan penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat semakin membaik dan semakin terstruktur karena pemerintah menjadi penanggung jawab dalam penanggulangan bencana tersebut.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Kebijakan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi mengenai program-program yang terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016 menyangkut tentang penanggulangan bencana.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deksriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dikarenakan pendekatan kualitatif mampu mendeskripsikan fenomena sosial yang diharapkan dapat menjelaskan

hal-hal yang berkaitan dengan Efektivitas Kebijakan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi ini

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 18 orang informan yang terdiri dari Kepala BPBD Kabupaten Muaro Jambi, Sekretaris BPBD Kabupaten Muaro Jambi, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kabupaten Muaro Jambi, Petugas Lapangan BPBD dan Masyarakat Kabupaten (sebanyak 10 orang).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Efektivitas Kebijakan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi menggunakan teori dari Duncan dalam Steers. Teori tersebut memiliki 3 indikator dalam mengukur efektivitas yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Adapun pembahasannya dapat dilihat dalam sub bab berikut :

3.1. Pencapaian Tujuan

Tingkat kesesuaian program kerja yang direncanakan dan yang ditetapkan mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi sudah banyak menyebabkan kerugian yang dialami oleh masyarakat sekitaran tempat terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dipicu oleh berbagai faktor yang terjadi. Pemerintah daerah setempat yang di bawah oleh BPBD selaku badan/lembaga pemerintahan yang mengatasi masalah bencana baik bencana alam maupun non alam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi. Pelaksanaan kegiatan pencegahan yang dilakukan BPBD Kabupaten Muaro Jambi untuk mencegah Kebakaran hutan dan lahan akan dipengaruhi oleh faktor yang mendukung kegiatan tersebut dan ada juga faktor yang menghambat proses berjalannya kegiatan dari pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Muaro Jambi dilakukan dengan mengacu kepada kebijakan pemerintah yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang mana pada pasal 4 disebutkan bahwa penetapan peraturan daerah ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Jambi. Dengan adanya kebijakan tersebut, memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan koordinasi, pertanggungjawaban, serta penegakan hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Muaro Jambi dalam menjalankan tugas yang diberikan haruslah sesuai prosedur yang ada. Namun tetap saja untuk mencapai ke sasaran sesuai target pasti ada beberapa kendala dan adanya hambatan saat terjadinya bencana. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan tersebut serta pengamatan penulis pada saat pelaksanaan proses penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam segi waktu dan sasaran target konkret pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Muaro Jambi ini belum maksimal atau belum mencapai

target yang diinginkan terlihat masih adanya beberapa kendala yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan penanggulangan menjadi terlambat dan tidak sesuai target capaian.

3.2 Integrasi

Proses koordinasi dan komunikasi antar pihak dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan merupakan hal yang sangat penting. Terjalannya komunikasi yang baik dan lancar antara Pemerintah Daerah dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muaro Jambi ataupun dengan masyarakat dan dengan OPD terkait akan sangat mempermudah proses penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan yang berlangsung, oleh karena itu komunikasi dan koordinasi yang baik harus dibangun antara Pemerintah dengan BPBD maupun masyarakat dan OPD terkait lainnya. BPBD dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai lembaga yang menangani penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan sudah melakukannya sesuai prosedur sebagaimana yang tertulis dalam peraturan dan pengaturan yang berlaku. Penulis juga menemukan bahwa koordinasi yang dilakukan ditandai dengan petugas lapangan yang mengikuti arahan agar kegiatan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu BPBD menjalankan peran dan fungsinya dalam berkoordinasi dan mengkomunikasikan segala sesuatu dengan masyarakat itu dilakukan dengan baik dan mendapat respon positif dari masyarakat sekitar. Upaya pendekatan tersebut termasuk kedalam ruang lingkup Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016 pada Pasal 4 Huruf c yang menjelaskan bahwa upaya penanganan terpadu yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan salah satunya yaitu dengan melakukan pendekatan hukum dan peran serta masyarakat. Sehingga apa yang dilakukan oleh pihak BPBD tersebut telah sesuai dengan kebijakan atau dasar hukum yang mengatur tentang pengendalian penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. dapat disimpulkan bahwa koordinasi dan komunikasi adalah komponen yang sangat penting dan memang semestinya menjadi satu padu agar terjalin kerja sama yang baik antar pemerintah, OPD terkait, maupun masyarakat yang mana mereka adalah sebagai penyukses kelancaran kegiatan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan apabila segala sesuatunya dilakukan sesuai prosedur dan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Terlihat disini bahwa pihak BPBD sudah menjalankan tugas dan perannya dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

3.3 Adaptasi

Penetapan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan upaya penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. Dalam kegiatan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan diperlukan adanya integrasi dengan organisasi-organisasi terkait dalam mencapai tujuan yang akan dilaksanakan. Suatu kegiatan tidak bisa berjalan efektif jika tidak adanya koordinasi dengan baik antar satu organisasi dengan organisasi lainnya, tujuan yang hendak dicapainya akan terhambat. Untuk program yang dilakukan oleh pihak BPBD dalam melakukan pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan adalah program Digital ASAP. Aplikasi Sistem Analisa Pengendalian Karhutla Digital (ASAP Digital) ini merupakan terobosan baru yang diluncurkan dan diresmikan secara Nasional oleh Kepala Polisi RI (Kapolri) bersama dengan Kementerian dan Lembaga-lembaga yang mengurus bagian perkebunan dan kehutanan. Aplikasi ini lahir di Provinsi Jambi yang dengan ini merupakan sebuah aplikasi yang diciptakan dari inovasi Polda

Jambi dengan dukungan BPBD dan KLHK. dengan adanya aplikasi ASAP Digital, program pencegahan yang dimiliki BPBD ini menjadikan para petugas dan yang bertanggung jawab lebih terbantu dan untuk menemukan titik api kebakaran menjadi lebih mudah. Tidak perlu menunggu panggilan yang terkadang lebih banyak kendalanya. Dengan aplikasi ini kita lebih bisa mengontrol dimana saja dan kapan saja walaupun sedang tidak di kantor. Sosialisasi publik yang dimaksud adalah kemampuan BPBD ataupun peran masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan khususnya pada kondisi sebelum terjadinya bencana atau pra bencana, merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan menjadi hal yang dapat menekan angka kejadian kebakaran, BPBD harus melaksanakan tugas Pemberdayaan Masyarakat dengan cara membentuk kegiatan atau suatu system kesiapsiagaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana kebakaran atau bencana lainnya yang sewaktu-waktu tidak dapat diprediksi kapan datangnya, sehingga masyarakat secara efektif dapat melakukan upaya dini untuk penyelamatan meskipun pihak dari petugas belum hadir dilokasi kejadian.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Efektivitas Kebijakan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Muaro Jambi menurut Duncan (Steers, 1985) terdapat 3 dimensi yang penulis gunakan untuk melakukan penelitian yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi belum semuanya berjalan secara efektif. Hal ini dibuktikan dengan setiap indikator dari dimensi yang dijabarkan pada hasil dan pembahasan. Capaian tujuan pada pelaksanaan kegiatan upaya penanggulangan bencana belum dilakukan secara maksimal karena ketepatan waktu dan dasar hukum yang kurang diperhatikan. Koordinasi dan komunikasi yang dilakukan BPBD kepada Pemerintah daerah dan masyarakat sudah cukup baik namun untuk disampaikan kepada masyarakat awam ini sedikit miskomunikasi dan menjadi faktor penghambat untuk keefektifan pelaksanaan penanggulangan bencana.

Program ini sudah berjalan cukup efektif seperti temuan Adelina Manullang dan Maesaroh (Adelina Manullang dan Maesaroh, 2019), namun program ini juga masih mempunyai kekurangan yaitu keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, dan kesadaran masyarakat. Sehingga dibutuhkannya ketiga aspek dalam meminimalisir proses penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.

Selain itu, penelitian ini berbeda dari penelitian Meyga Sisillia, Yulia Nurjannah dan Tukiman (Meyga Sisillia, Yulia Nurjannah dan Tukiman, 2019) dimana BPBD Kabupaten Muaro Jambi mampu memaksimalkan sosialisasi di masyarakat tentang bagaimana tahapan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan terkhusus pada wilayah yang berada di sekitaran lahan gambut sehingga adanya kesiapsiagaan masyarakat jika suatu saat terjadinya bencana.

Efektivitas Kebijakan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Muaro Jambi juga mempunyai kekurangan lain dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yaitu luasnya kawasan hutan yang terbakar tidak sebanding dengan jumlah personil yang akan turun dilapangan, sehingga jumlah personil menjadi penyebab belum maksimalnya hasil dilapangan saat karhutla terjadi seperti temuan dari Mutaqqin (Mutaqqin, 2015).

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan hambatan dalam Efektivitas Kebijakan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Muaro Jambi ini Keterbatasan sumber daya manusia Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muaro Jambi menjadi faktor penghambat dalam cepat tanggapnya proses pemadaman api di lapangan. Keterbatasan sumber daya manusia ataupun kurangnya personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muaro Jambi menjadi faktor penting dalam proses pemadaman kebakaran dan menjadi faktor penting dalam mensosialisasikan upaya pencegahan karhutla itu sendiri. selanjutnya Sarana dan prasana diperlukan dalam proses upaya pencegahan atau proses pemadaman api dilapangan, namun apabila sarana dan prasana tidak mencukupi maka proses akan menjadi lambat dilakukan. Dan faktor hambatan berikutnya yaitu kesadaran masyarakat terhadap menjaga hutan dan lingkungan masih rendah sehingga terjadinya kebakaran hutan secara tiba-tiba tanpa dicegah lebih dahulu.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Efektivitas kebijakan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi dengan melihat apa-apa saja yang menjadi isi dalam program sudah dilaksanakan namun belum berjalan dengan maksimal, meskipun terdapat beberapa faktor penghambat tersebut namun upaya yang dilakukan dengan mengadakan sosialisasi, penyuluhan, serta pelatihan, penambahan personil serta sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penanggulangan bencana.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muaro Jambi sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Duncan dalam Steers.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Efektivitas Kebijakan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Muaro Jambi untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala BPBD Kabupaten Muaro Jambi beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKNP.
- Kurniawan, A. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: pembedaan.
- Lubis, Hari dan Martani Huseini. *Teori Organisasi*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Tangkilisan, H. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Steers, Ricard M. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Budiardjo, M. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Keraf, A. Sonny. 2010. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta. Kompas Media Nusantara.
- Indriyanto. 2012. *Ekologi Hutan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syaufina L. 2008. *Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Indonesia*. Malang: Bayumedia.
- Moleong. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: REMAJA ROSDAKARYA.
- Sugiyono. 2013. *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2015. *METODE PENELITIAN PENDIDIKAN (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Creswell, J. W. 2008. *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed Edisi Ketiga*. Bandung: Pustaka Pelajar.
- Nazir, M. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Galia Indonesia.
- Nurdin, I dan SH. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya. Medi